

Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor Berbasis Lahan

Disampaikan pada kegiatan Lokakarya Penentuan Capaian Dambaan dan Indikator Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan

21 November 2023



Pesan Kunci

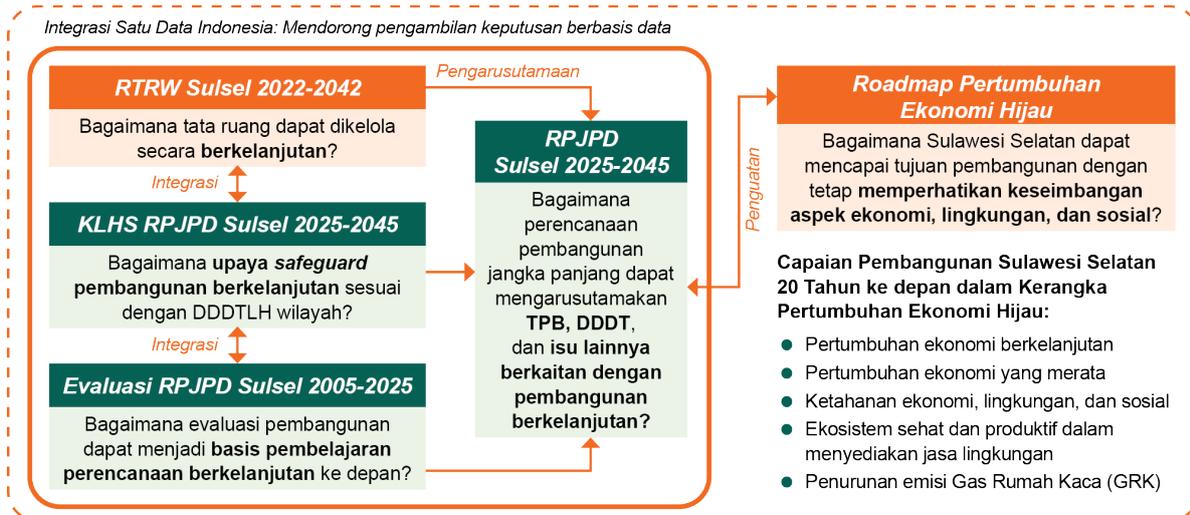
- Pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Selatan yang berketahanan iklim, pangan, dan responsif gender bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya.
- Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan, tatanan sosial, kebijakan alokasi dan kesesuaian lahan, serta peningkatan nilai produk maupun perbaikan pasar.
- Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan data, informasi dan pemodelan dengan prinsip *informed* (berbasis proyeksi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan), *inclusive* (melibatkan pemangku kepentingan), dan *integrative* (mendorong sinergi dan memadukan tujuan konservasi, pembangunan dan perencanaan tata ruang).
- Kontribusi pertumbuhan ekonomi hijau terhadap pembangunan berkelanjutan memperkuat komitmen Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
- Momentum Penyusunan RPJPD merupakan bagian penting dalam agenda implementasi pertumbuhan ekonomi hijau secara komprehensif dengan menggunakan peran dan kewenangan pemerintah daerah

A. Pengantar

Pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sulawesi Selatan merupakan inisiatif yang mendasari perancangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau selaras dengan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*), serta program dan target Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional rencana pertumbuhan ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally*

determined contributions (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan strategi adaptasi. Pada tahun 2022, Indonesia merilis laporan *Enhanced NDC* yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31.8% (dan 43.2% dengan dukungan internasional) serta implementasi adaptasi pada sektor strategis pangan, air, dan energi.

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Selatan akan membantu untuk mengintegrasikan faktor iklim dengan perencanaan pengelolaan lahan. Penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau akan menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau yang responsif gender dan mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak



Gambar 1. Kerangka integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, RTRW Sulawesi Selatan 2022-2042, KLHS RPJPD dan RPJPD Sulawesi Selatan

pada penghidupan masyarakat, terutama pada sektor-sektor penghidupan berbasis lahan. Hal ini berkesesuaian dengan potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan.

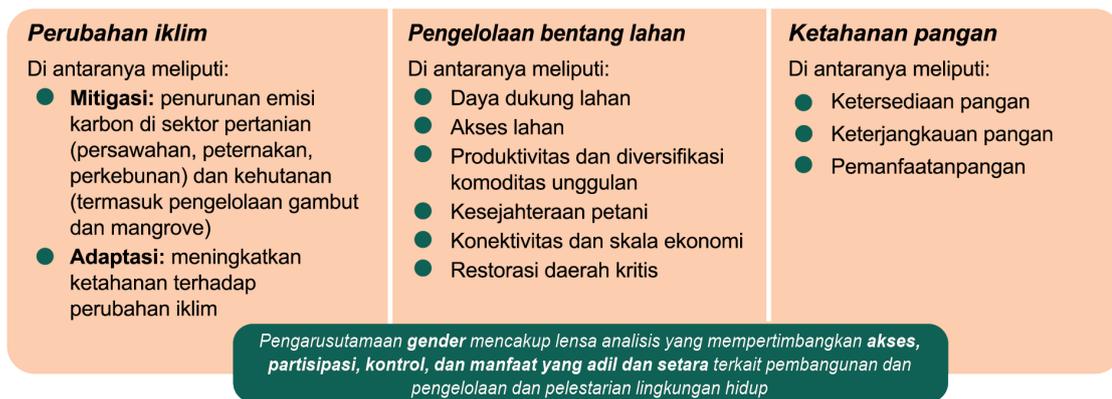
Provinsi Sulawesi Selatan akan menyusun rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau. Rencana Induk disusun dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah dalam mencapai tujuan bersama secara inklusif, integratif dan berbasiskan informasi. Komitmen para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau diwujudkan dalam pengarusutamaan ke dalam Rencana Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan skenario yang dituangkan secara spasial dalam rencana induk.

Dokumen peta jalan mencakup kebijakan pendukung; strategi, intervensi, dan program, dilengkapi dengan indikator pertumbuhan ekonomi hijau yang terkait dengan indikator SDGs sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi.

B. Perumusan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Melalui serangkaian proses lokakarya dan berbagai Diskusi Terpumpun (FGD) diantara para pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan, telah dihasilkan rumusan awal terhadap tujuan dan strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Tujuan dan Strategi ini yang akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai target dan intervensi pertumbuhan ekonomi hijau secara keseluruhan. Dalam berbagai diskusi yang masih dilaksanakan, Tujuan dan Strategi ini masih akan terus disempurnakan untuk dapat mendapatkan kesepakatan bersama dan mawadahi kepentingan seluruh unsur.

Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan	
1	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil dan merata
2	Penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial dan lingkungan
3	Ekosistem yang sehat dan produktif
4	Pengendalian emisi GRK dari sektor berbasis lahan termasuk ekosistem pesisir
Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan	
Strategi 1: Pengelolaan tata ruang dan penggunaan lahan terintegrasi	
Strategi 2: Optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif dan inovatif	
Strategi 3: Pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah	
Strategi 4: Perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi	
Strategi 5: Konektivitas wilayah yang merata dan adaptif terhadap bencana	
Strategi 6: Pengelolaan dan restorasi DAS terpadu	
Strategi 7: Pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan	



Gambar 2. Aspek bahasan pada setiap komponen pengarusutamaan KLHS RPJPD

C. Ruang Lingkup Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Tahapan pengarusutamaan antara lain mencakup upaya memastikan indikator pertumbuhan ekonomi hijau sebagai indikator dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, mengalokasikan sebagian kegiatan dalam pertumbuhan ekonomi hijau untuk dibiayai dengan anggaran daerah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi ketercapaian yang terukur dan berjangka.

Ruang lingkup pengarusutamaan yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup aspek **perubahan iklim, pengelolaan bentang lahan, dan ketahanan pangan** (Gambar 2).

Pengarusutamaan **perubahan iklim** mencakup pengarusutamaan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan. Aspek mitigasi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan penurunan emisi karbon sedangkan aspek adaptasi meliputi hal-hal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti ketersediaan air bersih dan risiko bencana.

Perbaikan **pengelolaan bentang lahan** oleh para pihak pengelola dan pengguna lahan dalam menjaga fungsi dan jasa lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kaum wanita maupun pria. Pada pengarusutamaan aspek ini, di antaranya dapat meliputi telaah terhadap potensi keanekaragaman hayati dan pengelolaan habitat, akses lahan, perubahan guna lahan, pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam, dan pengelolaan jasa ekosistem.

Ketahanan pangan mencerminkan terpenuhinya kebutuhan pangan melalui akses yang cukup, ketahanan pangan yang aman, dan penyediaan pangan yang berkualitas. Pengarusutamaan ketahanan pangan di antaranya dapat mencakup penanganan kerawanan pangan, akses pangan dan gizi,

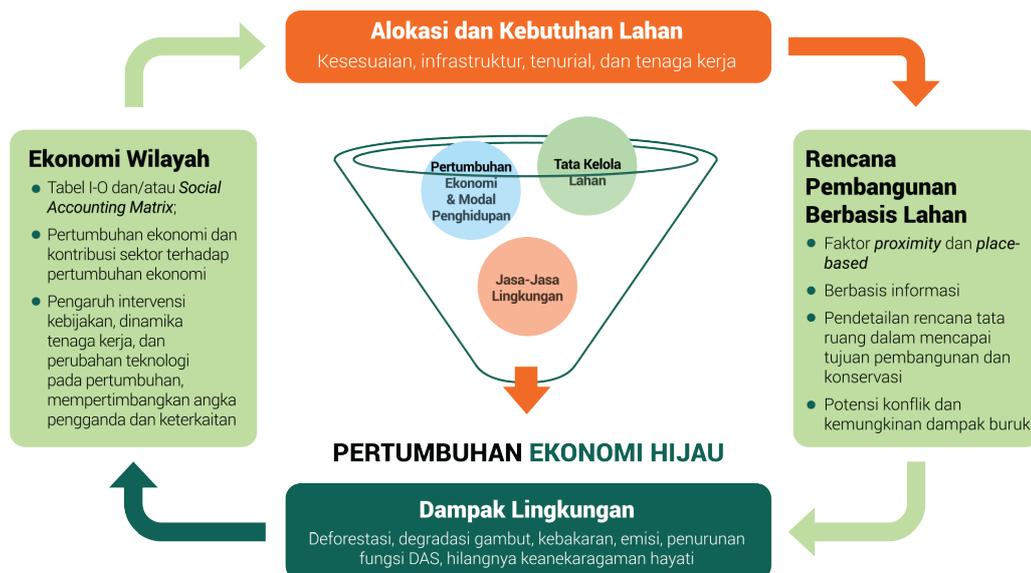
pengelolaan pangan lokal, dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengarusutamaan **gender** tidak menjadi telaah yang tersendiri melainkan memperkaya dimensi dalam pengarusutamaan aspek-aspek penghidupan berkelanjutan lainnya. Dalam hal ini, pengarusutamaan gender perlu menghadirkan lensa yang lebih tajam dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara terkait pembangunan dan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

C. Inisiatif dan Komitmen Provinsi Sulawesi Selatan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif dalam mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Inisiatif tersebut mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil. Sulawesi Selatan telah menghadapi momentum yang tepat untuk memulai transformasi menuju pertumbuhan ekonomi hijau melalui dukungan politis, jaringan kerja, dan sumber daya alam yang melimpah.

Penyusunan rencana makro dan peta jalan Pertumbuhan Hijau Sulawesi Selatan melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan, mempertimbangkan semua aspek serta didukung oleh data dan analisis yang sah. Rencana dan peta jalan tersebut harus mampu mengakomodasi permintaan global terhadap produk-produk bernilai ekonomi tinggi, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi hijau yang sehat dan menjamin kesetaraan penghidupan bagi seluruh kelompok masyarakat.



Gambar 3. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan yang berketahanan iklim, pangan, dan responsif gender

Dengan demikian, melalui perencanaan yang baik, Sulawesi Selatan bukan hanya akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau namun juga bisa menjadi teladan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan untuk berbagai fungsi dari berbagai pemangku kepentingan, tatanan sosial, kebijakan alokasi lahan, kesesuaian lahan, manfaat ekonomi (pada skala regional, usaha, petani) maupun aspek lingkungan sehingga bisa diperoleh rencana tata guna lahan, opsi praktik silvikultur yang ramah lingkungan untuk komoditi unggulan, peningkatan nilai produk maupun perbaikan pasar (Gambar 3).

D. Pendekatan dan Metodologi Penyusunan Rencana

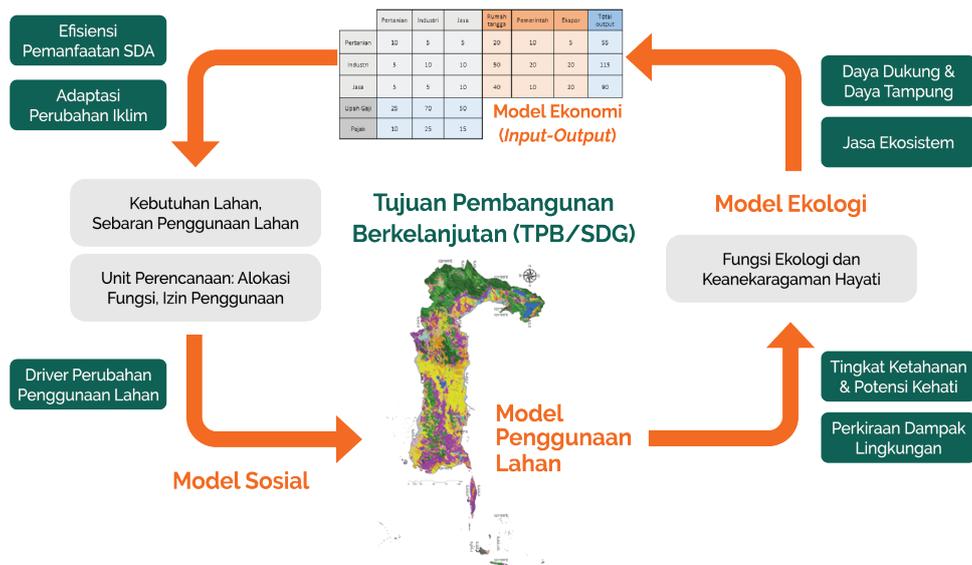
Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan data, informasi dan pemodelan. Adapun prinsip yang digunakan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, antara lain:

- **Inclusive:** Melibatkan para pemangku kepentingan dalam mendiskusikan aspirasinya dan menegosiasikan rencana yang akan disetujui bersama. Strategi dan intervensi menengahkan masyarakat, pengetahuan dan konteks lokal.
- **Integrative:** Menitikberatkan pentingnya proses sinergi dan memadukan berbagai tujuan konservasi, pembangunan, perencanaan tata ruang, dengan menghindari *silos*.

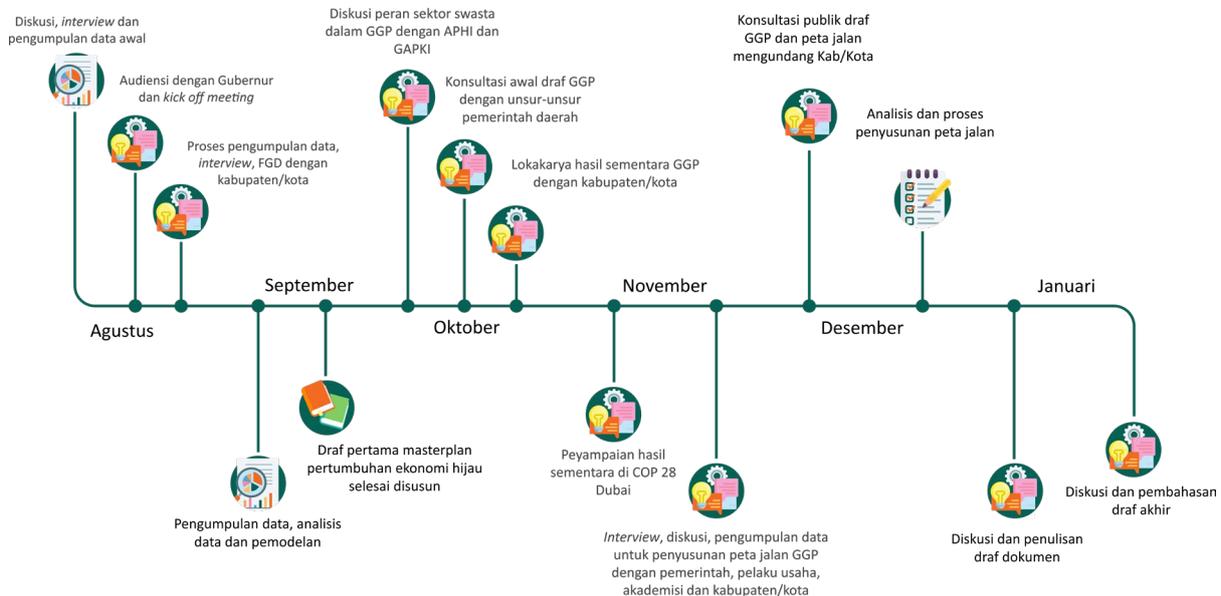
- **Informed:** Proyeksi dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan dari skenario *Green Growth* dimodelkan menggunakan data dan informasi yang akurat (Satu Data Indonesia) sebagai dasar analisis *trade-off* untuk memilih skenario pembangunan yang paling sesuai.

Pemodelan pertumbuhan ekonomi hijau dibangun dari pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses pembangunan yang kontekstual pada kewilayahan dan mencakup dinamika keruangan maupun waktu. Simulasi dari skenario pembangunan menggunakan perangkat lunak LUMENS (*Land-Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang dirancang untuk menghasilkan proyeksi (*ex-ante*) kinerja yang diukur berdasarkan indikator makro yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gambar 4).

Sistem pertumbuhan ekonomi hijau dimodelkan sebagai sistem ekonomi regional menggunakan model *Input-Output*, di mana sektor lahan melakukan transaksi dengan sektor lain. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dari sektor lahan diterjemahkan ke dalam kuantifikasi luasan kebutuhan lahan untuk komoditas unggulan tertentu. Lokasi yang memungkinkan untuk terjadinya perluasan, intensifikasi maupun alihguna lahan berdasarkan infrastruktur, tutupan dan ketersediaan lahan dimodelkan secara *spatially explicit* untuk menghasilkan proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan yang kemudian digunakan untuk mengkuantifikasi perubahan fungsi dan jasa ekosistem yang diakibatkan perubahan lahan. Dampak ini akan selanjutnya menjadi umpan balik kepada ekonomi regional.



Gambar 4. Kerangka analisis pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan



Gambar 5. Lini masa penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau

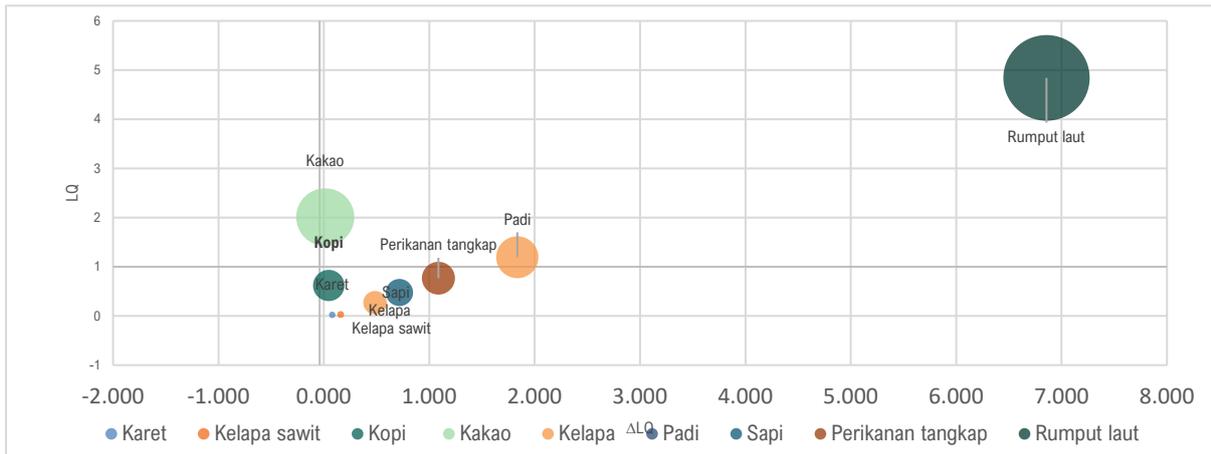
Analisis dan pemodelan beberapa skenario pembangunan (skenario Bisnis Seperti Biasa atau *Business as Usual/BAU*) dan pertumbuhan ekonomi hijau menghasilkan peta intervensi, proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan, proyeksi besaran dari indikator makro berdasarkan skenario pembangunan. Hasil tersebut digunakan dalam pembuatan rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu dengan proses: (i) peta intervensi akan memberikan arahan program dan kegiatan sebagai bagian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek daerah mendukung peninjauan kembali RTRWP, menyinergikan RPJPD/RPJMD kabupaten dan RTRWK dengan provinsi; (ii) peta proyeksi berguna untuk mengarahkan RTRWP dan RTRWK, mengantisipasi bencana dari dampak negatif alihguna lahan maupun

praktik pengelolaan lahan tidak berkelanjutan, yang diperoleh dari analisis kuantitatif fungsi dan jasa lingkungan yang terdampak oleh alihguna lahan dan praktik lahan; (iii) analisis *trade-off* membandingkan berbagai skenario pembangunan dan berbagai dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan).

Secara keseluruhan keluaran ini berguna untuk menegosiasikan dan memilih skenario dengan *trade-off* terbaik yang bisa diterima semua pihak, serta bisa merekomendasikan modifikasi yang perlu dilakukan dalam skenario yang sudah dibangun. Ilustrasi lini masa penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau selama jangka waktu 1 tahun dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 7. Perbandingan PDRB Sulawesi Selatan terhadap (kiri) Indonesia dan (kanan) Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi tahun 2010-2022 (Sumber: BPS, 2023)



Gambar 6. Location Quotient Komoditas Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan (2014-2019)

E. Konteks Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan

Ekonomi Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kontribusi PDRB paling besar di Pulau Sulawesi. PDRB cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2022. Pertumbuhan PDRB kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 5,09 persen, yang pertumbuhannya didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti dengan perdagangan besar dan konstruksi. Dalam satu dekade terakhir, proporsi kontribusi lapangan usaha PDRB menunjukkan pola yang sama.

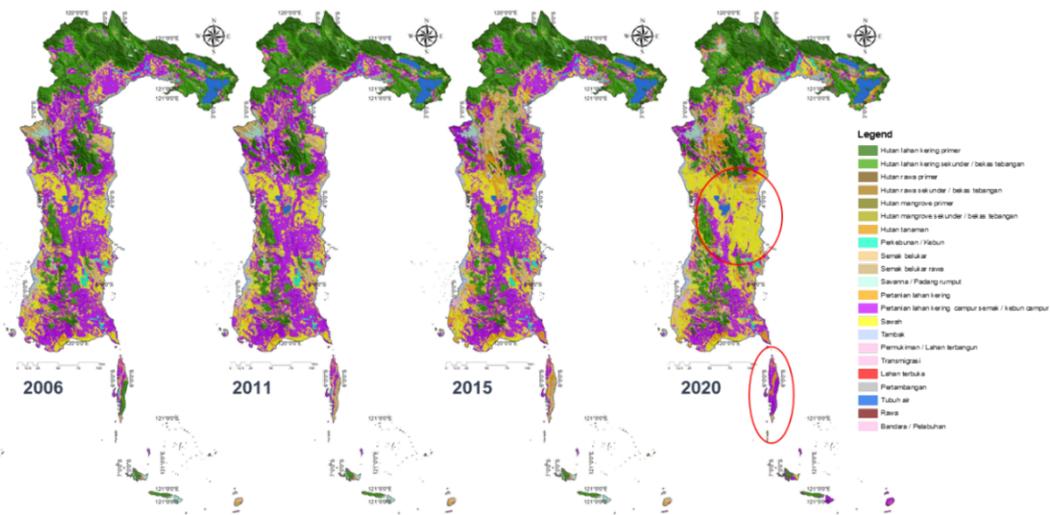
Ditelaah dari komoditas unggulan Sulawesi Selatan, selama 2014-2019, komoditas rumput laut, kakao dan padi merupakan sektor basis atau unggulan dengan surplus produksi dan memiliki peran lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Komoditas rumput laut memiliki potensi pengembangan lebih cepat jika dilihat dari performanya selama tahun 2014-2019.

Ke depan, perekonomian unggulan Sulawesi Selatan perlu diperkokoh melalui konsep pengembangan perekonomian yang berkelanjutan, resilien, dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berbasis lahan dan bergantung pada sumber daya alam lokal.

Dinamika Penggunaan Lahan dan Fungsi Ekosistem

Dinamika tutupan hutan 2006-2020 menunjukkan bahwa luasan hutan mengalami penurunan sekitar 0,12% di Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 8). Dalam jangka 20 tahun, luas pertanian meningkat 13,6% dari luas total provinsi. Adapun sebesar 13,47% luas kebun campur menunjukkan tren penurunan, tercatat sebagai penurunan kelas tutupan lahan tertinggi sepanjang periode 20 tahun terakhir. Pada Gambar 4, lingkaran merah pada tahun 2020 menunjukkan wilayah-wilayah dengan peningkatan luasan pertanian dan sawah, terutama di daerah Pulau Selayar dan Bone.

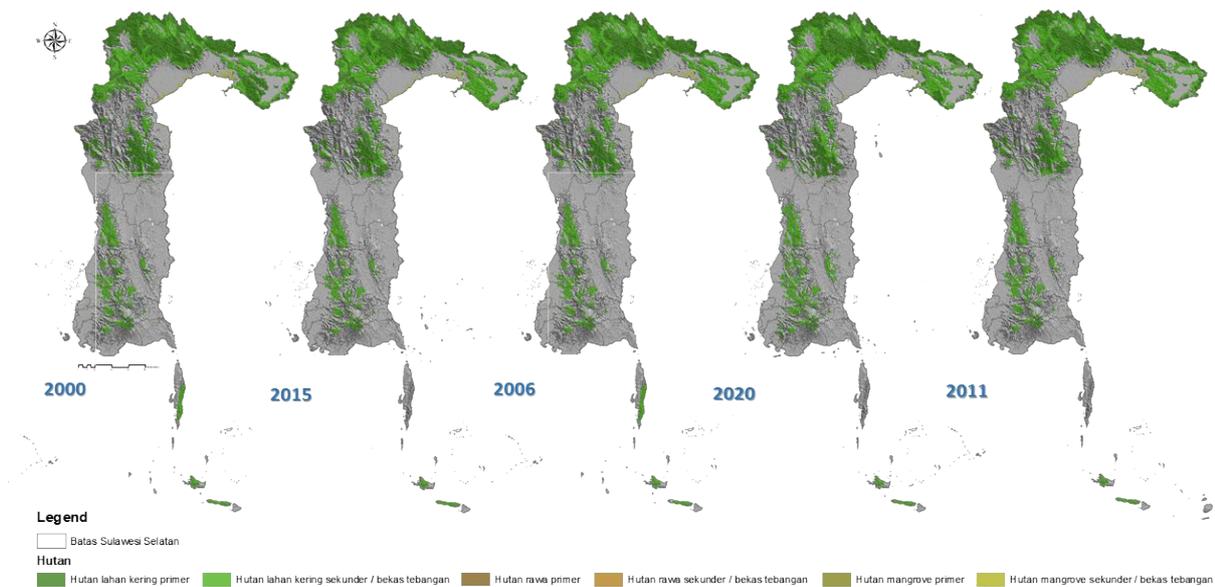
Ditinjau dari aspek kehutanan, pada rentang 2000-2020 juga tercatat terjadinya perubahan luas tutupan hutan yang terus menurun, yakni sekitar 68 ribu hektar (Gambar 8 dan Gambar 9). Meski tercatat terjadinya penurunan, selama periode tersebut dan terutama pada tahun 2015-2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk mempertahankan luas hutan tersebut. Hasilnya, dapat dilihat bahwa luas tutupan hutan pada periode 2000-2015 mengalami penurunan dari 1.454.139,32 ha menjadi 1.385.534,25 ha namun kembali mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020 menjadi sekitar 1.424.600 ha.



Gambar 8. Perubahan guna lahan Sulawesi Selatan 2006-2020 (Sumber: KLHK)

	2000	2005	2011	2015	2020
Hutan	1,454,139.32	1,429,431.27	1,403,944.01	1,385,534.25	1,424,612.14
Bukan hutan	3,091,551.59	3,116,259.7	3,141,730.1	3,160,156.66	3,121,023.36

Gambar 9. Luas tutupan hutan di Sulawesi Selatan 2000-2020 (Sumber: KLHK)



Gambar 10. Peta Perubahan Luas Tutupan Hutan di Sulawesi Selatan 2000-2020 (Sumber: KLHK)

Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional, di mana hal ini ditunjukkan dengan tingginya produksi padi relatif terhadap provinsi lainnya serta besarnya luasan LP2B di seluruh wilayah provinsi.

Saat ini luas area LP2B sekitar 474 ribu hektar atau setara dengan 10.3% area Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaran area LP2B Provinsi Sulawesi Selatan cukup optimis, hal ini sebagai representatif produksi pangan yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga ketahanan pangan merupakan salah satu langkah kunci dalam pengentasan kemiskinan. Luasnya sebaran LP2B dan tingginya produktivitas padi dan



beberapa komoditas lainnya di Sulawesi Selatan, seperti kakao, rumput laut, dan kopi, seharusnya dapat meningkatkan opsi-opsi penghidupan masyarakat berbasis komoditas lokal. Akan tetapi, isu ketahanan pangan dan kemiskinan masih menjadi persoalan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Bone. Hal ini tingginya pengeluaran pangan bulanan, capaian indeks ketahanan pangan yang belum optimal, dan tingginya prevalensi stunting. Perlu diperkuat upaya pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan daerah untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mampu mendorong pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Responsif Gender

Pemanfaatan sumber daya alam berkeadilan memiliki makna bahwa semua berhak atas pemanfaatan, akses, kontrol, dan partisipasi atas pengelolaan sumber daya tersebut untuk penghidupannya, tanpa kecuali. Akan tetapi, kerap kali nilai dan struktur sosial masyarakat memberikan berbagai macam batasan sehingga muncul kelompok-kelompok masyarakat yang

termarginalkan dari pemanfaatan sumber daya alam, seperti yang terjadi kepada perempuan, lansia dan anak-anak, serta kelompok disabilitas.

Ketimpangan yang terjadi semakin tampak dengan adanya fenomena perubahan iklim.

Khususnya pada sektor berbasis lahan, seperti pertanian dan perikanan, hasil FGD yang dilakukan oleh ICRAF Indonesia bersama DP3A Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan adanya berbagai ketimpangan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol atas pengelolaan sumber daya alam untuk penghidupan yang dialami oleh kelompok perempuan. Beberapa di antaranya meliputi: perbedaan akses perempuan dan laki-laki terhadap saprodi pertanian, permodalan, dan informasi, rendahnya akses edukasi laki-laki dalam menjaga terumbu karang dan mangrove, dan pendidikan layak sulit diakses anak-anak di perdesaan.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanuntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai Oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin Oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

Informasi Lebih Lanjut:

Pokja Penyusunan GGP Provinsi Sulawesi Selatan
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp: (0411) 453486



In partnership with
Canada



www.lahanuntukkehidupan.id